


CD Newsletter

Media Komunikasi & Informasi Lintas PIC Sulawesi

EDISI PERKENALAN, JUNI 2008



Komitmen Bersama

“Suatu Upaya Peningkatan Kapasitas Stakeholders Melalui Pendekatan Menyeluruh Dan Terpadu Serta Komitmen Bersama”



REDAKSI CD PROJECT TEAM

ALAMAT REDAKSI : KANTOR GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN,
JL. URIP SUMOHARJO NO. 269, GEDUNG KOPERASI LT. 1, MAKASSAR, 90231
TELEPON (0411) 443618, FAX. (0411) 443607



Proyek kerjasama antara Japan International Cooperation Agency
(JICA) dan Binafintek Dengan Reolusi di Sulawesi

Contents

- Menenal CD PROJECT.....1
- Komite Implementasi Propinsi.....2
- GPCS; Belajar dari Praktek Terbaik.....3
- Seminar Pengambilan Kebijakan.....4
- Membangun Per"Temannan"5

Dari REDAKSI



Salam Kenal

Edisi Perkenalan, kami menyebut edisi kami kali ini. Dengan harapan terjalin suatu jaringan informasi dan komunikasi maupun berbagi pengalaman, kami perkenalkan tentang proyek kami dan seputar informasi tentang kegiatan-kegiatan tahun pertama yang telah dan akan kami lakukan.

Edisi 2 (dua) bulanan adalah rencana kami hadir ditengah-tengah anda, menyajikan informasi seputar kemajuan kegiatan dan isu-isu yang berkembang dalam proses peningkatan kapasitas para pelaku pembangunan di Sulawesi. Harapan kami, apa yang disajikan dapat bermanfaat dan edisi Perkenalan kami ini dapat tersimpan terus di hati anda.



Redaksi



Mengenal CD PROJECT

CD PROJECT... Tentunya istilah ini masih asing ditelinga anda dan pasti masih banyak juga yang bertanya-tanya, proyek tentang apa itu...?, sejak kapan dimulai....?, kegiatannya apa-apa saja...??? dll, dsb... maka agar anda tidak semakin larut dalam kebingungan, inilah sekilas tentang CD project itu.....

Sulawesi Capacity Development (CD) Project dikukuhkan dalam sebuah *Record of Discussion* yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang pada Tanggal 7 Agustus 2007 yang meliputi 6 provinsi di wilayah Sulawesi dengan durasi 3 (tiga) tahun (16 September 2007-15 September 2010).

Dan sesuai dengan namanya, maka Sulawesi CD proyek ini didesain dengan tujuan utama yaitu penguatan kapasitas stakeholder dalam pembangunan daerah khususnya dalam mengembangkan mekanisme kolaborasi antar stakeholder di wilayah Sulawesi. Mengapa penekanannya kapasitas? Karena tanpa adanya kapasitas yang memadai dari berbagai stakeholder, maka keberlanjutan dan kemajuan dari segala bentuk program tidak akan maksimal. Dan melalui kolaborasi antar berbagai stakeholder untuk berkomitmen saling bekerjasama dan menyatukan persepsi guna pencapaian tujuan bersama inilah maka hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam

pembangunan dapat dieliminasi.

Siapa saja stakeholder dimaksud?... Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi sampai level komunitas termasuk didalamnya. Dan dari beberapa komponen tersebut telah dibentuk suatu Komite yang dikoordinasikan oleh masing-masing Bappeda Provinsi yang disebut Provincial Implementation Committee (PIC) atau KOMITE IMPLEMENTASI PROVINSI. Komite inilah yang merupakan pelaku utama dalam CD Project yang secara umum membuat strategi dan menganalisis kegiatan prioritas sesuai kebutuhan serta secara khusus melakukan fasilitasi dan koordinasi kepada stakeholder dalam pelaksanaan berbagai kegiatan CD Project.

Kegiatan-Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam upaya peningkatan Kapasitas tersebut?... Ada seminar/Diklat bagi Level Pengambil Kebijakan, aparat Perencana sampai pada Fasilitator Masyarakat sebagai entry point dan penyusunan action plan setelah pelatihan. Selain itu ada pelaksanaan kegiatan pilot serta sharing pengalaman antar stakeholders. (Informasi lebih lengkap dapat menghubungi PIC di masing-masing provinsi).

Tentunya durasi proyek ini merupakan waktu yang singkat dalam proses "*capacity development*" karena bukan hanya menyangkut perubahan pola pikir tetapi juga sistem budaya kerja di organisasi kita. Oleh karena itu tanpa adanya "*leadership*" dan "*ownership*" dari para stakeholder, maka usaha kita tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Sekali lagi, peranan PIC maupun stakeholder lain memegang peranan penting untuk menjaga keberlanjutan program ini, agar usaha kita tidak sia-sia dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Komite Implementasi Provinsi

Provincial Implementation Committee (PIC)

KOMITE Implementasi Provinsi atau *Provincial Implementation Committee* (PIC) merupakan ajang/wadah bagi setiap stakeholder yang terlibat memaksimalkan kolaborasi yang sinergis khususnya dalam menata sebuah proses pembangunan yang partisipatoris dan demokratis sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang ada pada setiap Wilayah/Daerah. PIC telah dibentuk di setiap provinsi di Sulawesi dengan harapan tidak hanya dimainkan dalam konteks CD Project semata namun pasca project seharusnya dapat dikembangkan oleh masing-masing provinsi sebagai pengawal dalam menjaga kolaborasi antar elemen pembangunan agar tetap berjalan dan efektif.

Dalam edisi perkenalan ini, 2 sumbangan tulisan telah diterima oleh Redaksi dari PIC Sulawesi Barat dan PIC Sulawesi Tenggara, inilah wajah dan kegiatan PIC.

KOMITE IMPLEMENTASI PROVINSI SULAWESI BARAT "WAJAH BARU DALAM PENGEMBANGAN KOLABORASI PERAN BAGI PROVINSI TERMUDA DI SULAWESI"

"Optimalisasi kerja dari anggota PIC harus menjadi cerminan empati/kesungguhan Sulawesi Barat dalam mendukung pengembangan kapasitas melalui peran kolaborasi untuk Pembangunan Daerah/Wilayahnya"- ini yang disampaikan oleh salah satu anggota PIC sebagai wakil dari perguruan tinggi, Bapak Amran dalam pertemuan rutin bulanan PIC di Sulawesi Barat.

PIC Sulawesi Barat telah dilegalisasi dalam bentuk "SK Gubernur Sulawesi Barat No : 513 Th 2007, tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembentukan Komite Pelaksana Provinsi Sulawesi Barat Pada Proyek Pembangunan Kapasitas se Sulawesi". Anggotanya terdiri dari Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bappeda, Badan Diklat serta DisHutBun Provinsi Sulawesi Barat dan secara rutin melakukan pertemuan Bulanan dengan agenda pembahasan kemajuan kegiatan, evaluasi efektifitas kerja serta perumusan agenda pengembangan kegiatan kedepan dan pembagian peran diantara anggota.

Selain pertemuan rutin, pada setiap pekan pertama (*sekitar tanggal 5-7 setiap bulannya*) juga dilakukan pertemuan yang sifatnya tentatif untuk merespon agenda CD Project seperti; Pembahasan/penetapan peserta Diklat dan kriteria peserta, Perekrutan calon peserta S2 Community Development, Pelaksanaan Mini workshop Good Practice Case Study (GPCS) serta hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk memaksimalkan proses dan target kegiatan.

Akankah peran PIC dapat efektif dalam membangun kolaborasi dan pengembangan kapasitas stakeholders di Provinsi Baru (*termuda*) di Pulau Sulawesi ini? Kami sebagai PIC

Sulawesi Barat sangat menyadari bahwa hal ini akan ditentukan oleh sejauh mana kesungguhan dari setiap unsur yang ada di dalam PIC.

TIM PELAKSANA **SULAWESI TENGGARA,** **MERAJUT KOLABORASI** **DALAM SULAWESI CD** **PROJECT**



Tim Pelaksana CD Project Sulawesi Tenggara dibentuk dan disahkan melalui SK Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 pada tanggal 25 Januari 2008. Tim ini terdiri dari unsur Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi. Sebagai Tim dengan latar belakang berbeda, tentu beban dalam menggerakkan dan mendukung kelancaran kegiatan CD Project di daerah sangatlah berat, apalagi semuanya dilakukan dengan semangat kolaborasi, karena disamping memfasilitasi kegiatan CD Project di level provinsi, Tim ini juga harus memfasilitasi kegiatan CD Project di 5 kabupaten/kota yakni Kabupaten Wakatobi, Kota Bau bau, Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan dan Buton Utara

yang rata-rata merupakan kabupaten/kota pemekaran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun dengan variasi kapasitas yang dimiliki Tim, beberapa upaya strategis dalam rangka mempercepat distribusi informasi ke daerah telah dilakukan Tim ini antara lain dengan membagi tanggung jawab personal tim di masing-masing kabupaten/kota sasaran CD Project, menetapkan kontak person kabupaten/kota serta memanfaatkan kunjungan dalam tugas lain untuk membangun

komunikasi/pertemanan dengan Pemerintah Kabupaten/kota mengenai CD Project baik secara institusional maupun secara personal. Di sisi lain, dengan perbedaan rutinitas tugas dan waktu luang, Tim pelaksana telah menetapkan pertemuan rutin bulanan sebanyak 2 kali untuk membahas perkembangan kegiatan dan pertemuan insidental untuk membahas hal-hal mendesak sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan CD Project di Sulawesi Tenggara.

Sejauh ini, Tim Pelaksana CD Project Sultra telah menyelenggarakan Workshop GPC Se-Sulawesi di Imperial Hotel Kendari pada tanggal 16-17 Januari 2008 dan telah mengikuti serangkaian kegiatan Sulawesi CD Project seperti Seminar Pengambil Kebijakan di Makassar, membantu Training Need Assessment (TNA) yang diselenggarakan PLSD Institute di Kendari, memfasilitasi peserta Community Facilitator Training dan Diklat Perencana dll. Selain itu, kegiatan Good Practice Cases Study telah dimulai oleh tim study yang berasal dari Pemda dan LSM Kegiatan GPCS ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran Tim dalam merajut kolaborasi multi-stakeholders di Sulawesi Tenggara.

Gambatte kudasai...



Belajar dari praktek terbaik..,



Adalah tema kegiatan mini workshop Good Practice Cases Study (GPCS) yang diselenggarakan di hotel Nisfha Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal, 28-29 Februari 2008 melalui *cost share* antara BAPPEDA Provinsi dan CD Project. Pelaksanaan Mini Workshop GPCS tersebut, dirangkaikan dengan sosialisasi Sulawesi Capacity Development Project (JICA Sulawesi CD Project) kepada 5 kabupaten/ kota sebagai lokasi target CD Project.

Pelaksanaan kegiatan mini workshop GPCS ini merupakan kegiatan tindak lanjut Komite Implementasi Provinsi (PIC) Sulawesi Tengah pada workshop membangun framework GPCS di Kendari Sulawesi Tenggara. Mini workshop kali ini, selain bertujuan untuk mengidentifikasi "kasus-kasus" yang baik dalam wilayah Sulawesi Tengah juga diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai good practice case dalam konteks CD Project.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari itu, dihadiri oleh 20 orang peserta yang terdiri dari 7 orang pelaku kasus (Masyarakat, LSM dan perguruan Tinggi), 6 orang dari unsur Bappeda Kabupaten/kota yaitu kepala Bappeda Tojo Unauna bersama staf, kepala Bappeda Kota Palu dan staf serta kepala Bappeda kabupaten Parigi Moutong beserta staf. Selain dari unsur SKPD Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan itu juga dihadiri oleh Ketua dan anggota PIC serta dari perwakilan Team CD project dari Sekretariat Makassar.

Mini workshop Good Practices Case adalah jenis kegiatan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah ini menampilkan beberapa narasumber dari para pelaku kasus yang dianggap baik berdasarkan 7 criteria GPCS. Adapun good practices case yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan Credit Union Bolano di kabupaten Parigi Moutong
- Pengelolaan Air Bersih oleh Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Watusampu kota Palu
- Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut di desa Kabalutan kepulauan Togean kab. Tojo Unauna
- Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Di Pulau Tiga kabupaten Parigi Moutong

Dalam rangka sharing pengalaman antar stakeholder Se Sulawesi sebagaimana yang diharapkan dalam CD project dan rekomendasi Mini workshop GPC Provinsi Sulawesi Tengah kali ini, maka selain PIC Sulawesi Tengah yang akan melakukan study kasus atas dukungan CD project, juga Bappeda provinsi Sulawesi Tengah terinspirasi dan akan berinisiatif untuk melakukan identifikasi dan membuat Data base tentang kasus atau praktek terbaik yang ada dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga bermanfaat, Terima kasih.



■ Focal Point dalam Komite Implementasi Provinsi Memperkuat Kapasitas melalui Training Participatory Local Social Development

Salah satu bentuk kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia adalah pelaksanaan training di Jepang bagi Aparat Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu Bappeda Provinsi Gorontalo mengutus Kepala Bidang Ekonomi yang juga berperan sebagai Koordinator Provincial Implementation Committee (PIC) di Provinsi Gorontalo, Ir. Ariyanto Husain, MMP untuk mengikuti training *Participatory Local Social Development Training (PLSD)* di Jepang yang telah dilaksanakan pada awal Maret tahun ini.

Pak Ariyanto telah melihat langsung cerita sukses perencanaan partisipatif di Iida City, Nagano Prefecture. Pelatihan ini sendiri diikuti oleh 12 negara antara lain Maroko, Cili, Mesir dan Panama. Dari Sulawesi diwakili oleh 2 (dua) utusan yakni Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. PLSD training adalah sebuah kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam pengambilan

kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan yang berbasis penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Menurut Pak Ariyanto, pendekatan ini sangat cocok untuk dijadikan konsep dasar dalam pelaksanaan Sulawesi CD Project di Gorontalo.

Dalam kesehariannya, Pak Ariyanto bukan hanya melaksanakan tugas rutinnnya sebagai Kepala Bidang Ekonomi, tetapi sebagai Koordinator PIC, beliau juga mampu *me-manage* timnya untuk secara proaktif merespon agenda-agenda kegiatan dalam CD Project. Sebagai contoh, hasil pelatihan yang diperoleh di Jepang diwujudkan dalam perannya sebagai salah satu pembicara dalam "Seminar Pengambil Kebijakan" yang dilaksanakan untuk memperkenalkan konsep PLSD kepada para pengambil kebijakan di Manado pada akhir Maret 2008.

Kepala BAPPEDA, Prof. Winarni mengungkapkan bahwa, "kami berharap Pak Ariyanto sedapat mungkin memberi nilai tambah pada kinerja aparaturnya melalui penerapan hasil PLSD training untuk mendorong kegiatan pembangunan khususnya di Provinsi Gorontalo.

Seminar Pengambil Kebijakan

Sebuah Pencerahan Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Pembangunan

SEMINAR bagi Pengambil Kebijakan dengan tema "KONSEP DAN KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH" telah dilaksanakan di Makassar pada tanggal 12-13 bagi peserta dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Sedangkan bagi 3 propinsi dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo berkumpul di Manado untuk pelaksanaan kegiatan serupa yang berlangsung pada tanggal 24-25 Maret 2008. Peserta seminar terdiri dari Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Kepala Bappeda masing masing Provinsi dan 5 kabupaten/Kota di tiap provinsi yang sudah dipilih oleh PIC (provincial Implementation Committee) yang menjadi target lokasi Sulawesi CD Project.

".....Sinergitas sepertinya menjadi aspek penting dalam kolaborasi. Jika berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap stakeholders pembangunan di daerah ini mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas, maka mimpi kita untuk membawa propinsi Se-Sulawesi menuju kemajuan, akan semakin mendekati kenyataan.....".

Kalimat di atas merupakan penggalan sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakan oleh Ibu **Marieta Kuntag** sebagai Assisten II Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara dalam acara pembukaan yang bertempat di Hotel Granpuri Manado.

Selain itu, mewakili Sulawesi CD-Project sambutan dibawakan oleh Pimpinan Project Sakuma Hiroyuki. Selama 2 hari peserta mendapat transfer ilmu dan pengalaman dari

Drs. Zainal Abidin, MSi yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Takalar (saat ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) dengan judul "Peran pengambil Kebijakan dalam Pembentukan Hubungan antara Masyarakat Lokal dan Pemerintah serta Pemanfaatan Proyek JICA dalam Pengembangan SDM".



Selain itu, salah seorang penggagas tentang pendekatan Participatory Local Social Development (PLSD) di Jepang yaitu **Prof. Yutaka Ohama** dari Universitas Nihon Fukushi diundang sebagai Narasumber yang menyampaikan tentang "Perspektif Pembangunan Daerah Ditinjau dari 3 Elemen Pembangunan dan Sistem Kemasyarakatan" serta "Pembangunan Partisipatoris dan peran pengambil kebijakan".

Dalam sesi Prof. Ohama, ditekankan perbedaan antara pendekatan partisipatif dan partisipatoris, dimana pendekatan partisipatoris adalah proses pembelajaran berbasis pengalaman bagi masyarakat. Dalam proses ini, bagian yang sangat penting tetapi sering dilupakan adalah persiapan sosial (penyadaran dan pengorganisasian diri) yang dibutuhkan untuk membuahakan program yang berkelanjutan. Sedangkan, partisipatif adalah pendekatan dimana dalam suatu kegiatan masyarakat ikut terlibat pada saat-saat tertentu yang bersifat sesaat tanpa adanya peningkatan kapasitas masyarakat.

Salah satu peserta menyampaikan komentar tentang sesi Prof. Ohama dengan penuh semangat, "Sangat menarik!. Semakin kita mengikuti materi ini makin banyak hal-hal yang kita sudah anggap sebagai partisipatoris ternyata hanya partisipatif saja. Karena anggapan kita yang salah ini menyebabkan proyek yang telah kita laksanakan sering tidak berkelanjutan".



Informasi dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

Mutasi Kepala BAPPEDA

Pada tanggal 24 Maret, dilaksanakan pelantikan pejabat Kepala Bappeda yang baru yaitu Dr. Ir. Lucky Longdong, M.Ed. oleh Gubernur Sulawesi Utara di Kantor Gubernur, dan dilanjutkan dengan acara Serah Terima Jabatan Kepala Bappeda dari pejabat lama Bapak Alex Wowor kepada pejabat baru pada tanggal 26 Maret di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh semua staff Bappeda serta Project Officer (PO) CD Project.

Dengan adanya pergantian ini maka Ketua PIC Sulawesi Utara saat ini adalah Dr. Ir. Lucky Longdong, M.Ed. Sehubungan dengan itu juga pimpinan dan staff CD-project mengadakan pertemuan pada tanggal 25 Maret di Hotel Granpuri yang difasilitasi oleh Dr. Noldy Tuerah (Anggota PIC dari unsur Perguruan Tinggi), peserta pertemuan terdiri dari Kepala Bappeda yang baru, Pimpinan CD-Project Sakuma Hiroyuki, Shintani Naoyuki, Ashar Karateng, Dr. Noldy Tuerah, Prof. Yutaka Ohama, dan PO Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun agenda pembicaraan adalah sekitar pengenalan program CD-Project, permasalahan pembangunan daerah serta konsep PLSD.



Workshop finalisasi Diklat "Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme kolaborasi"

Proses Peningkatan Kapasitas PIC Melalui Penyusunan Kurikulum Dan Module Diklat

WORKSHOP Finalisasi desain diklat "Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme kolaborasi" telah dilaksanakan di Makassar pada tanggal 21-22 April 2008, yang merupakan event kedua setelah workshop desain diklat pada bulan Maret 2008. Workshop yang dihadiri oleh 3 orang anggota dari setiap Provincial Implementation Committee membuahakan beberapa output melalui pembagian ide dan pengalaman antara lain kesepakatan kurikulum diklat yang terdiri dari 8 materi pokok yaitu 1) Hakekat dan kecenderungan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, 2) Kerangka konseptual

pemahaman kondisi spesifik daerah, 3) Kerangka konseptual pembangunan berbasis komunitas dan pendekatan partisipatoris, 4) Kerangka dan mekanisme kolaborasi, 5) Perencanaan fasilitasi komunitas dan mekanisme kolaborasi, 6) Monitoring fasilitasi prakarsa komunitas dan mekanisme kolaborasi, 7) Evaluasi fasilitasi prakarsa komunitas dan mekanisme kolaborasi, dan 8) Teknik penyusunan action plan).

Diklat ini adalah salah satu dari 3 Diklat utama dalam CD Project dan akan dimulai bulan Juni diselenggarakan pada Badan Pengembangan SDM Aparatur provinsi Sulawesi Selatan, Makassar untuk Provinsi

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, sedangkan pada Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara, Manado untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan tujuan peningkatan kemampuan perencana untuk mengelola fasilitasi prakarsa masyarakat dan proses kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Dalam workshop itu, Bapak Ventje Kawet, SH, kepala bidang Manajemen Pemerintahan Badan Diklat Sulut sangat aktif menyampaikan saran dan pendapat. "Seleksi peserta harus betul-betul serius oleh PIC. Ini Penting sekali. Peserta jangan main-main. Itulah tekad kita", ujarnya.





■ Community Facilitator Training Seri I

“Membangun Per”teman”an dengan Masyarakat Tanpa Uang Tanpa Proyek”

Beberapa peserta pada hari pertama mulai Kasak kusuk meminta materi yang akan dipresentasikan dan menanyakan training kit, lengkap dengan tanda pengenal kepada panitia. Sementara peserta lain memasuki ruangan dengan muka kebingungan yang hanya menjangkau beberapa buah kursi yang disusun melingkar tanpa meja. Training model apa ini dan kenapa tidak ada sarana yang memadai untuk peserta..?, itulah beberapa komentar peserta dengan sedikit meremehkan.

DEMIKIAN sekelumit cerita pada awal pelaksanaan Training Community Facilitator Seri I yang dilaksanakan pada Tanggal 14-19 April di Makassar. Training yang diikuti oleh 29 peserta dari 6 Provinsi se-Sulawesi ini terdiri dari 20 unsur LSM dan 9 dari unsur pemerintah dengan tugas dan jabatan yang berbeda-beda pula.

Training ini merupakan tahap awal dari 5 rangkaian tahapan fasilitator training yaitu (I) Pengembangan Kemitraan, (II) Analisis Isu Berbasis Masyarakat, (III) Perumusan Rencana Aksi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, (IV) Implementasi dan Monitoring serta (V) Evaluasi dan Feed Back. Kelima tahapan tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga peserta yang ikut pada seri I semestinya mengikuti tahapan

berikutnya. Training serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang merupakan sub kegiatan dari JICA Sulawesi CD Project. Dan sesuai tema pada Seri I ini adalah “Pengembangan Kemitraan”, maka diharapkan mereka mempunyai kemampuan untuk mengenali, membangun per”teman”an dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif masyarakat yang didampinginya. Itulah salah satu hal yang ditanamkan oleh Fasilitator Fary Franscis (Increase, Kupang) dan Arusdin Bone (LP2G, Gorontalo) kepada calon-calon fasilitator ini.

Dalam upaya membangun kemitraan dengan masyarakat, dipilih Kampung Biring Bonto, Desa Palantikang Kec. Patalassang Kab. Gowa sebagai lokasi latihan. Menurut Pak Ansar yang berlatar belakang LSM dari Provinsi Gorontalo bahwa dalam pelatihan kita diajak oleh fasilitator menemukan apa yang harus kita pelajari disini. Jadi kita tidak diberi pengertian tentang ini adalah A. Dan suatu hal yang sangat menarik adalah selama ini yang kami sadari sebagai fasilitator, ternyata banyak kesalahan yang kami lakukan selama memfasilitasi masyarakat. Karena selama ini seakan-akan menjadi fasilitator itu adalah menjadi guru di masyarakat. Tapi kenyataannya dalam konsep training ini, kita diajarkan bagaimana memposisikan diri sebagai mitra dan bagaimana kita menggali potensi yang besar dari masyarakat.

■ Rubrik Tokoh

“Mengenal Kekuatan dari Dalam Diri Kita”

Filosofi seorang Bupati dari Kabupaten Wakatobi

Figur seorang Bupati yang sangat meyakini filosofi tersebut tercermin dalam visi misi programnya. Dialah Bapak Ir.Hugua Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara. Sebelum berkarir di dunia politik beliau lebih dikenal sebagai aktivis LSM yang sudah kental dengan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat diterapkan pula kepada stafnya di dunia pemerintahan.

SEMANGAT untuk merubah Wakatobi terkenal di mata dunia meski butuh waktu dan biaya yang besar untuk sampai disana tetap diperjuangkan. Untuk mencapai itu programnya tidak muluk-muluk. Hanya dengan mengenali kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Wakatobi kemudian difokuskan dalam sebuah gerakan pembangunan. Kabupaten Wakatobi terdiri dari 97 % lautan dan 3% daratan) sebagai asset utama dikemas dalam sebuah paket program yang terpadu yaitu “Parawisata, Kelautan dan Perikanan”. Pengembangan Pariwisata didorong melalui percepatan pembangunan bandara udara Matahora yang tahun ini sudah direncanakan pendaratan Maskapai Merpati Airlines melalui Makassar. Sementara sektor perikanan didorong melalui percepatan penyusunan peta penangkapan ikan pelagis melalui tata ruang wilayah kabupaten, Untuk sektor kelautan Kabupaten Wakatobi akan didorong sebagai kabupaten konservasi yang mana Kabupaten Wakatobi berada di Coral Triangle Center dan sebagai taman nasional laut di Indonesia. Dalam melaksanakan program tersebut pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas aparatnya melalui pelatihan-pelatihan. Dalam seminar

Pengambil Kebijakan yang diadakan oleh JICA di Makassar tanggal 12-13 Maret 2008 beliau menceritakan pengalamannya tentang pemahaman menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan SDM.

Dengan tetap meyakini filosofi bahwa “*tak seorang pun dapat dengan tulus membantu orang lain tanpa membantu diri sendiri*” beliau tetap berusaha lebih dahulu sebelum meminta bantuan dari luar. Salah satu contoh adalah pelatihan CBIA (Community Based Issue Analysis) untuk fasilitator kepada staf Pemda dan LSM dibiayai melalui APBD, kemudian JICA membantu dalam menyediakan narasumber. Lagi-lagi beliau melontarkan sebuah filosofi bahwa “*Apa yang ada di belakang dan di depan kita adalah hal yang sangat kecil dibanding dengan apa yang ada dalam diri kita*”. Inti dari gerakan Bupati adalah mengenali apa yang kita miliki sebagai kekuatan untuk berbuat. Hal yang paling mendasar adalah dalam diri kita artinya pemerintah daerah dan masyarakatnya, JICA hanya pihak luar. Akhirnya kerjasama dengan JICA mulai terjalin meski JICA hanya membantu sedikit saja. Kabupaten Wakatobi meski masih seumur jagung dan hanya sebuah titik jika dilihat dalam Peta Indonesia akan tetapi kini sudah mulai dilirik dan menjadi perhatian di mata dunia.

